

Siapapun Presiden, Yang Penting Kabinetnya

Wahyudi Kumorotomo

Nuansa Pilpres 2014 yang *head-to-head*, hanya menghadirkan dua pasangan calon yakni Prabowo-Hatta dan Jokowi-Kalla, telah menguras energi psikologis rakyat yang harus segera menentukan pilihannya. Ketegangan diantara pendukung kedua kubu ini juga semakin mendidih melihat bahwa hasil survai tentang selisih elektabilitas kedua pasangan calon makin tipis. Setidaknya, survai dari empat lembaga eksternal yang keluar pada pekan ini menyebutkan bahwa selisih elektabilitas kedua calon hanya tinggal berada pada rentang antara 0,5 hingga 3,4 persen.

Tetapi, di atas semua hiruk-pikuk ini, apakah sosok presiden benar-benar memiliki perbedaan dalam hal perumusan kebijakan publik? Yang luput dari perhatian adalah bahwa kinerja seorang presiden lima tahun mendatang sebenarnya tergantung kepada perumus kebijakan strategis paling pokok, yaitu para menteri atau sosok kabinetnya. Pengalaman hampir dua dasawarsa reformasi di Indonesia menunjukkan bahwa terlaksananya arah kebijakan seorang presiden sangat ditentukan oleh kinerja para menterinya.

Barangkali ini sudah menjadi ciri khas ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem semi-parlementer, yang kebetulan juga cocok dengan cita rasa kuliner orang Indonesia. Pengamat kuliner Bondan Winarno mungkin setuju bahwa di Indonesia apapun makanannya, yang penting sambalnya. Dalam hal efektivitas perumusan kebijakan, siapapun presidennya, yang penting kabinetnya.

Tantangan visi-implementasi

Dari segi visi, janji kedua pasangan Capres-Cawapres sebenarnya hampir sama, yaitu pengutamaan kepada kepentingan nasional untuk memakmurkan rakyat. Dengan jargon nasionalisme untuk menjadi "macan Asia", Prabowo-Hatta mengungkapkan program aksi dengan membangun ekonomi yang kuat, mewujudkan ekonomi rakyat, serta membangun kembali kedaulatan pangan, energi dan sumberdaya alam. Sementara itu, visi "Indonesia Hebat" Jokowi-Kalla mengungkapkan tiga tema pokok sejalan dengan konsep Trisakti, yaitu kedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Misi yang diusung oleh Prabowo-Hatta tertuang dalam 8 butir pernyataan yang menyebutkan prioritas anggaran untuk pembangunan pertanian, perbankan nasional untuk penyaluran kredit bagi petani, alokasi APBN Rp 1 miliar untuk desa/kelurahan, hingga reformasi agraria untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan Jokowi-Kalla mencanangkan 7 butir misi, yang dimulai dari pembangunan sumberdaya manusia melalui "revolusi mental", pembangunan *techno-park* untuk konsultasi pertanian dan energi, bantuan modal untuk 10 juta UMKM, reformasi agraria, hingga pengurangan subsidi bahan-bakar secara bertahap untuk membangun infrastruktur. Tampak bahwa rumusan misi kedua pasangan ini juga punya banyak kesamaan. Dalam beberapa kali kesempatan debat, kedua pasangan mengakui adanya beberapa kesamaan visi dan misi mereka.

Dengan demikian, selain karakter kepemimpinan yang berbeda, sebenarnya yang akan lebih menunjukkan perbedaan adalah bagaimana kedua Capres ini akan mewujudkan misi mereka, bagaimana program-program strategis tersebut akan dilaksanakan oleh para perumus kebijakan sektoral yaitu para menteri. Cara kedua pasangan ini memilih para menternya akan sangat berpengaruh kepada efektivitas implementasi kebijakan yang dirumuskan.

Sayangnya, sejauh ini publik masih belum punya informasi yang cukup mengenai sosok kabinet yang akan dibentuk oleh kedua Capres. Di media sosial, sudah berseliweran beberapa nama yang disebutkan berdasarkan spekulasi tentang Timses maupun Parpol pendukung kedua Capres. Namun informasi tersebut belum pernah dikonfirmasi atau disampaikan secara terbuka oleh kedua Capres.

Prabowo pernah menyebutkan kemungkinan untuk menunjuk menteri senior untuk Aburizal Bakri sebagai tokoh dari Golkar yang mendukungnya, sementara Hatta pernah menyampaikan rencana pembentukan kabinet ahli dengan memilih orang-orang terbaik dari partai. Jokowi berulang kali mengatakan untuk membentuk kabinet profesional yang bisa bekerja, tetapi belum pernah menyebut sebuah nama yang layak untuk menduduki jabatan di kabinet. Sedangkan Kalla mengatakan untuk memilih orang-orang yang mampu bekerja untuk menyelesaikan masalah secara cepat. Tetapi tidak banyak nama yang secara eksplisit disebutkan oleh kedua pasangan.

Karena itu, kini publik hanya bisa menduga-duga apa yang akan terjadi seandainya masing-masing kubu memenangi pertarungan dalam Pilpres. Seandainya Prabowo-Hatta terpilih setelah mendapatkan suara rakyat yang terbanyak, masalah pokok yang harus diselesaikan adalah memastikan semua tokoh Parpol pendukungnya cukup puas dengan jatah menteri atau pejabat negara yang akan dipilihnya. Selain oleh Gerindra dan PAN, pasangan ini sudah didukung oleh koalisi yang terdiri dari Golkar, PPP, PKS, dan belakangan Demokrat. Seperti yang telah terjadi dalam pembentukan kabinet pada masa pemerintahan SBY, tidak ada dukungan yang gratis. Dan tampaknya akan relatif sulit bagi Prabowo-Hatta untuk membentuk sebuah kabinet ahli (*zaaken cabinet*) seperti yang didambakan oleh rakyat banyak.

Lalu seandainya Jokowi-Hatta yang terpilih, penunjukan jajaran kabinet juga akan ditentukan oleh tokoh Parpol pendukung di luar PDIP, yaitu Nasdem, PKB, dan Hanura. Namun karena jumlah Parpol pendukung pasangan ini lebih kecil, jatah menteri dari Parpol juga akan relatif kecil. Kemungkinan untuk masuknya para teknokrat atau figur-figur profesional akan lebih terbuka. Masalahnya adalah bahwa para menteri di jajaran kabinet itu juga harus memiliki kemampuan ekstra selain profesionalisme dan keahliannya. Merumuskan kebijakan strategis ketika berhadapan dengan 56 persen anggota DPR yang sudah berjajar di sisi oposisi tentu bukan hal yang mudah. Anggota kabinet harus memiliki kemampuan persuasi, *lobby* dan berbagai kepiawaian politik lainnya.

Di atas semua itu, kebutuhan akan jajaran kabinet yang memiliki kemampuan menerjemahkan visi dan misi ke dalam implementasi kebijakan yang jelas dan terukur adalah sesuatu yang sudah lama dirindukan oleh bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan SBY, sudah begitu banyak rumusan kebijakan bagus-bagus yang akhirnya terhenti sebagai wacana. Disamping karena gaya kepemimpinan konsensus SBY dan kesulitan

mengkoordinasikan kebijakan lantaran banyaknya menteri yang lebih berperan sebagai pimpinan Parpol ketimbang perumus kebijakan sektoral, penyimpangan juga sering terjadi pada tingkat teknis di jajaran pejabat Eselon I yang mulai tersusupi oleh kepentingan-kepentingan Parpol. Yang dibutuhkan saat ini adalah tokoh-tokoh kabinet yang memiliki kemampuan bukan hanya sebagai politisi tetapi juga sebagai manajer (Gilley, 2005). Kualitas seperti ini belum banyak terlihat dari para tokoh pendukung masing-masing Capres. Tetapi bagaimanapun juga, kebutuhan ini harus bisa terpenuhi dengan baik.

Segudang masalah

Seluruh warga-negara Indonesia yang menentukan pilihannya di bilik suara tanggal 9 Juli nanti sudah selayaknya mempertimbangkan kemampuan setiap pasangan Capres-Cawapres untuk membuat kebijakan strategis guna mewujudkan cita-cita demokrasi, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata. Kemenangan seorang presiden tidak akan menyediakan kemewahan waktu untuk menikmati dan merayakannya terlalu lama. Bahkan, melihat kemungkinan selisih kemenangan yang sempit, mungkin tidak ada lagi masa *honey-moon* seperti ketika SBY memenangi Pilpres pada tahun 2004.

Oleh sebab itu, seluruh jajaran kabinet harus siap bergerak cepat karena begitu banyaknya masalah bangsa yang harus diselesaikan. Masalah-masalah tersebut sebagian besar merupakan masalah publik yang belum tertangani atau kurang mendapatkan perhatian pada masa pemerintahan SBY. Ada beberapa masalah mendesak yang sebenarnya bisa ditangani oleh Kabinet SBY dalam masa pemerintahan yang tersisa. Tetapi melihat kemauan politik yang ada dan kondisi pasca Pilpres yang menempatkannya sebagai periode *lame-duck*, banyak agenda kebijakan yang masih menunggu terpilihnya presiden baru.

Masalah yang memerlukan penanganan cepat dan tepat adalah memburuknya defisit fiskal dalam beberapa tahun terakhir. Kebutuhan subsidi energi (terutama BBM dan listrik) akan mendekati angka Rp 400 triliun pada tahun anggaran 2014. Sementara itu, nilai tukar rupiah yang sudah lebih dari Rp 12.000 merupakan persoalan tersendiri di tengah defisit transaksi berjalan yang membengkak. Ekonomi Indonesia kini lebih banyak menjadi pasar bagi produk-produk luar-negeri ketimbang sebagai produsen yang kompetitif di tingkat internasional sedangkan mulai tahun 2015 kita sudah harus menjalankan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Upaya mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM bukan merupakan langkah yang mudah di tengah popularitas seorang presiden baru yang selisih kemenangannya sempit. Pada saat yang sama, lonjakan konsumsi BBM dari sektor industri dan transportasi masih sangat sulit diredam. Untuk sektor transportasi, akan sangat berat untuk meyakinkan agar rakyat berhemat dengan BBM karena rakyat pun tidak punya pilihan untuk terus menggunakan kendaraan pribadi akibat infrastruktur dan sarana transportasi publik yang sekian lama terbengkalai dan tidak digarap serius oleh pemerintah. Maka, jajaran kabinet benar-benar harus bekerja keras untuk mengatasi masalah defisit anggaran ini, dan kesemuanya menuntut

bukan hanya itikad baik, tetapi juga kemampuan teknis dan persuasi yang tinggi.

Warisan persoalan yang juga harus diselesaikan adalah kesenjangan sosial dan tingginya angka kemiskinan. Indeks Gini di Indonesia sudah sampai pada titik yang sangat eksplosif bagi masalah sosial, yaitu 0,41 (BPS, 2013). Bandingkan dengan data pada tahun 2002 yang masih pada angka 0,33. Kendatipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa dipertahankan lebih dari 5 persen, manfaatnya untuk menutup ketimpangan sosial masih sangat kecil. BPS mencatat bahwa pada paruh pertama tahun 2014, jumlah penduduk miskin Indonesia masih sebesar 28,3 juta orang atau 11,25 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Masalah kesenjangan dan kemiskinan terjadi karena tumpulnya kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah akut di lapangan. Koordinasi kebijakan diantara kementerian yang terkait merupakan persoalan mendasar dalam kabinet pelangi pada masa SBY. Kecuali itu, kebijakan desentralisasi menciptakan kompleksitas tersendiri karena banyaknya Kepala Daerah yang melakukan korupsi anggaran dan kurang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, terisinya kabinet oleh orang-orang yang profesional, kemampuan presiden untuk mengkoordinasikan kebijakan dan mencegah korupsi anggaran adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan saat ini.

Masalah kesenjangan dan kemiskinan tidak mungkin dipecahkan hanya dengan mendengungkan wacana. Demikian pula korupsi tidak mungkin dicegah dan diberantas hanya dengan membentuk Satgas, atau mengkampanyekan gerakan integritas. Sudah saatnya semua kebijakan disertai dengan implementasi yang jelas, tegas, terukur dan dievaluasi secara ketat. Semua ini hanya bisa terwujud apabila terbentuk kabinet ahli dengan kepemimpinan yang mampu mengevaluasi implementasi kebijakan secara baik. Sambil mempertimbangkan gambaran program kedua Capres, warga yang belum menentukan pilihan kiranya bisa mempertimbangkan orang-orang di sekeliling Capres dan Cawapres yang akan menduduki jabatan di kabinet. Kualitas kabinet akan sangat menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.

Penulis adalah guru-besar Administrasi Publik, Fisipol UGM